



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUB UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **LYDIA SILVANNA DJAMAN**
2. Jabatan : **DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**
3. NHK : **135951**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.048.375.000**

1. Tanah Seluas 204 m2 di TANGERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 125.256.000
2. Tanah Seluas 204 m2 di TANGERANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 125.256.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 244 m2/200 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 813.888.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/45 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 62.025.000
5. Tanah Seluas 560 m2 di KOTA SAMARINDA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 45.920.000
6. Tanah Seluas 10092 m2 di KUTAI KARTANEGARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 319 m2 di KOTA SAMARINDA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 125.686.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/84 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 775.172.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/84 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 775.172.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 609.500.000**

1. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 365.500.000
2. MOTOR, HONDA CBR SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL



SENDIRI Rp. 35.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL

SENDIRI Rp. 9.000.000

4. MOBIL, HONDA HRV MINI BUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **930.500.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **50.000.000****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **1.897.883.879****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **6.536.258.879****III. HUTANG** Rp. **----****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **6.536.258.879**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **30 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.